

Aktivis partai politik di perkotaan stui mengenai sivilitas demokratis (democratic civility) pada masyarakat majemuk di surakarta

Suryo Adi Pramono, supervisor

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=95740&lokasi=lokal>

Abstrak

Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikemukakan Hefner (1998) --bila disederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilai kebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Partisipasi demokratis warganegara dalam sebuah tatanan politik interaktif dengan mengandaikan adanya kerjasama antara warganegara dan negara yang mampu melindungi hak-hak warganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapat terwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarta? Basis ekonomi dipandang sebagai entry point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivis tersebut. Sedangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry point pula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakarta. Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalah kombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society (Tocqueville dan Neera Chanda) dan shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambungkan dengan teori O'Donnell dan Schmitter tentang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dan korporatisme negara yang dimaksudkan untuk memahami sistem politik pemerintahan Soeharto sebagai konteks makro historis.

Penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif ini (karena belum ada satu pun penelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinan terbentuknya democratic civility tersebut masih bersifat embrional. Secara umum nilai kebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukum telah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu tertentu ia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-demokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan, pemaksaan kehendak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu ia membutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis partai politik-- dan bersifat multi-dimensional --bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis) ekonomi-- secara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kultur dan struktur sosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasuk ketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otoritarian menuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, sejumlah peluang dan hambatan turut mewarnai dinamika kehidupan para aktivis partai politik tersebut.

Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai politik (terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basis ekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambatan) dengan menggunakan data

primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik snowballing, wawancara tak berstruktur, wawancara mendalam, pengamatan terlibat, data statistik, media massa (misalnya: klip koran), dokumentasi relevan, literatur dan hasil penelitian terkait Trianggulasi dan pendekatan mik - etik pun diterapkan terhadap data lapangan agar diperoleh data yang sah. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penelitian parsial dan akhir berdasarkan negotiated understanding antara peneliti dan subyek penelitian.

Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yang menjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk ke "ruang kesadaran" peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih relevan untuk memahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kedua, konsep Samuel Huntington tentang strong government terlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga, begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi perlunya implementasi civil society --terutama sebagaimana dikemukakan Tocqueville, Neera Chandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Keempat, konsep civil society secara vertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiasi lain) pada perkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorak kolaborasi-kritis baik secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formal economy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy (Evers dan McGee) kiranya sangat membantu dalam memahami basis ekonomi subyek penelitian. Namun sejumlah konsep tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakan bersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Keenam, konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyek penelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan "konsep tingkat menengah" (Merton) supaya lebih aplikatif. Ketujuh, konsep "asosiasi" (Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokan sosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidak jelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejumlah individu yang terintegrasi di dalam negara (regime actors, terinspirasi oleh terminologi Hefner: regime actors! Islam) sekaligus pula menjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasi oleh terminologi Hefner: civil actors). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi" tersebut --dari sudut pandang aktor-- menjadi tidak jelas pada temuan ini. Menurut saya - secara tentatif- visi dan analisis asosiasiilah yang perlu menjadi titik pijak, bukan keanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranya masih di dalam proses perkembangan yang jauh dari finalitas kesepakatan antar teoritis. Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnya kehidupan yang demokratis di antara sesama warganegara serta interaksi antara warganegara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan negara. Kesembilan, konsep-konsep teori sosiologi klasik dan modern masih cukup relevan pada topik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasar subjective meaning (Weber); (3) tindakan sosial berdasarkan motif (interests dan values)

menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" Lord Acton: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi"; (5) "desublimasi represif" (Herbert Marcuse), (6) teori strukturasi: interaksi antara agency dan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurut Juergen Habermas. V

Berkaitan untuk memperoleh terapan lapangan, secara metodologis, small group discussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politik yang terjadi pada para aktivis partai tertentu. Cross-check cenderung dilakukan secara interpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian metodologi lain dapat diterapkan dalam penelitian.

Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebar, dengan berbagai macam sudut pandang, kerangka teori, metodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajian lanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan memperluas eksplorasi awal ini.